PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT YANG MENDUKUNG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Teguh Wahyono dan Rizki Amalia

ABSTRAK

Perkebunan rakyat kelapa sawit memiliki peranan penting dalam perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini ditandai dengan luas areal perkebunan rakyat kelapa sawit yang mencapai 3,77 juta ha atau 41,53% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012. Namun, perkembangan luas areal perkebunan rakyat tersebut tidak disertai dengan produktivitas yang optimal. Kendala yang dihadapi perkebunan rakyat dalam peningkatan produktivitas terdiri dari berbagai faktor, diantaranya: bahan tanaman bermutu rendah, pelaksanaan kultur teknis yang tidak tepat, pemasaran yang tidak laancar, lemahnya kelembagaan, perilaku pekebun yang subsisten. Dalam makalah ini dipaparkan perumusan prinsip pola pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit yang disesuaikan dengan kriteria perkebunan berkelanjutan pada *Indonesian Sustainable Palm Oil* (RSPO). Berdasarkan ketujuh kriteria ISPO yang telah ditetapkan, kemungkinan hanya sebagian yang dapat diakomodir secara swadaya dalam pengembangan perkebunan rakyat, yaitu: sistem perijinan dan manajemen perkebunan, penerapan teknis budidaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk melengkapi kriteria tersebut sehingga mencapai tujuh kriteria, perlu bantuan dari pemerintah dan lembaga lainnya, yang difasilitasi dan dikoordinir pemerintah.

Kata kunci : perkebunan rakyat, kelapa sawit, pola pengembangan

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Teguh Wahyono (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: teguh_sujanto@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang dengan pesat dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir. Laju pertumbuhan yang disertai dengan pembukaan lahan kebun baru membawa konsekuensi dan implikasi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan pengalaman dan realita di lapangan, maka upaya untuk mendorong pengembangan industri kelapa sawit (baik hulu maupun hilir, termasuk rantai perdagangannya) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut.

Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/PERMENTAN /OT.140/3/2011 diartikan sebagai sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (Anonim, 2011). Perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu dikelola dengan baik mengingat perannya dalam perekonomian nasional dalam perolehan PDB, penyerapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan, perolehan ekspor non migas, dan pengembangan wilayah (Wahyono dan Amalia, 2012).

Dorongan dalam menciptakan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan pada dasarnya telah dimulai dengan dibentuknya *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada tahun 2004. RSPO tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan para pemangku kepentingan (Anonim, 2012). Pemerintah Indonesia sendiri kemudian meluncurkan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada 2011 untuk meningkatkan daya saing

minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan (Kementerian Pertanian, 2011). Agar suatu perkebunan kelapa sawit dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, hendaknya memiliki kriteria (sesuai ketetapan ISPO) yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : (1) sistem perizinan dan manajemen perkebunan, (2) penerapan pedoman dan teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, (3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, (4) tanggung jawab terhadap pekerja, (5) tanggung jawab perusahaan terhadap individu dan komunitas, (6) pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan (7) komitmen terhadap perbaikan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia dikenal beberapa bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit, diantaranya perkebunan besar Negara (PBN), perkebunan besar swasta (baik nasional maupun asing), dan perkebunan rakyat (PR). Perkebunan rakyat di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970an dengan dibentuknya pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan areal seluas 3.125 ha di tahun 1979. Hingga saat ini, perkebunan kelapa sawit rakyat telah memiliki porsi yang cukup besar pada industri kelapa sawit di Indonesia dengan luas usaha mencapai 3,77 juta ha pada tahun 2012 atau 41,53% dari total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Ditjenbun, 2012).

Namun, selama satu siklus ekonomi sejak awal terbentuknya, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia, antara lain rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas produk, kurangnya adopsi teknologi, serta kesulitan dalam permodalan. Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat, tetapi juga dapat berdampak dalam kemajuan industri kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, dalam makalah ini dibahas pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dapat mendukung usaha yang berkesinambungan, termasuk penerapan ISPO yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kemungkinan untuk memiliki kriteria ISPO bagi perusahaan (perkebunan) besar, tidaklah terlalu sulit, mengingat kemampuan permodalannya sangat memadai. Sebagaimana diketahui, bahwa pelaku dan atau pemilik usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia (yang dapat berupa usaha budi daya dan/ atau pengolahan hasil) adalah badan usaha yang berbentuk: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (Nasional, Asing), Perkebunan Rakyat (PR). Dalam makalah ini dipaparkan perumusan prinsip pola pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit yang disesuaikan dengan kriteria perkebunan berkelanjutan pada *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.

KENDALA DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT KELAPA SAWIT

Dipandang dari segi pemilikan usaha perkebunan, pada tahun 2012, Perkebunan Rakyat menempati porsi kedua terbesar pada industri kelapa sawit Indonesia, dengan luas usaha sekitar 3,77 juta ha dari luas total 9,07 juta (41,6%). Sementara itu luas usaha PBN dan PBS berturut-turut adalah 683.227 ha (7,5%) dan 4,6 juta ha (50,9%) (Gambar 1). Namun selama satu siklus ekonomi sejak awal tahun 1980-an, masih banyak permasalahan yang dihadapi Perkebunan Rakyat, antara lain rendahnya produktivitas dan kualitas produk (Gambar 2).

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, bahwa antara tahun 2000-2012 produktivitas CPO milik PR rata-rata masih dibawah 3,5 ton per ha per tahun; sedangkan produktitivitas CPO milik PBS dan PBN sudah diatas 3,5 ton bahkan PBN sudah diatas 3,7 ton per ha per tahun. Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas tanaman diantaranya adalah: a). Penggunaan benih dengan kualitas yang rendah, b). Pelaksanaan kultur teknis yang tak memenuhi standar, c). Kesuburan tanah yang rendah (baik fisik maupun kimia), dan d). Iklim yang kurang atau tidak kondusif. Uraian dari faktor-faktor tersebut dikemukakan sebagai berikut.

a). Penggunaan benih dengan kualitas yang rendah

Sulitnya akses informasi terhadap bahan tanaman unggul menyebabkan para pekebun menggunakan bahan tanaman illegitim dengan kualitas rendah yang terbukti dengan rendahnya produktivitas. Kajian di beberapa provinsi yang merupakan sentra produksi perkebunan rakyat (Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur) dijumpai bahwa 60% bahan tanaman yang digunakan oleh perkebunan rakyat kelapa sawit bersumber dari bahan tanaman illegitim dan 90% nya merupakan petani swadaya (Agustira, *et.al*).

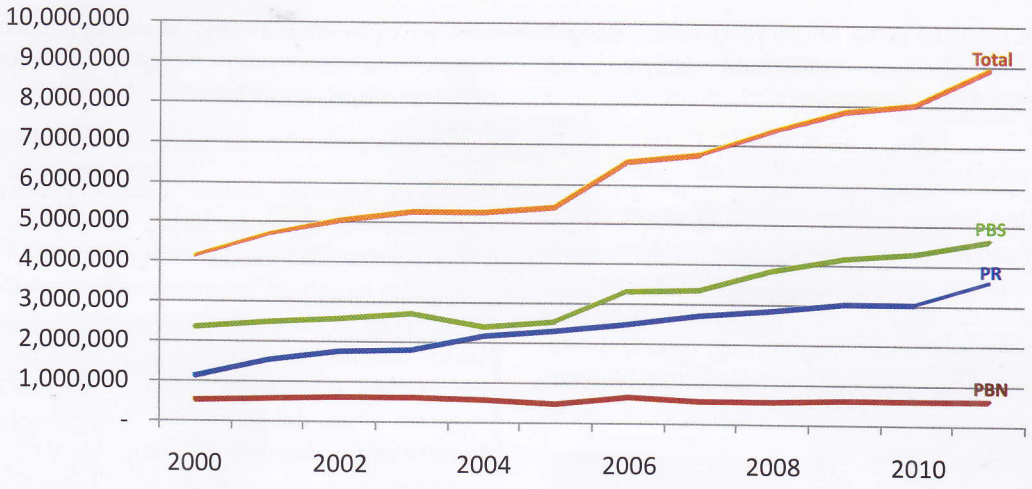

Gambar 1. Komposisi Luas Area (ha) Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Status Kepemilikan Pelaku Usaha, 2000-2010

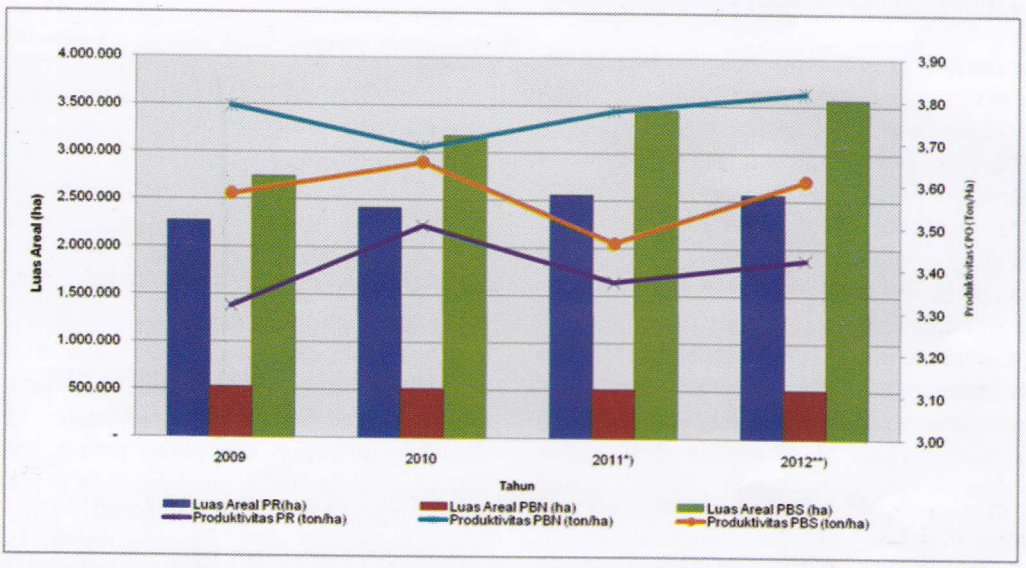

Gambar 2. Perbandingan Luas Areal Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Minyak Sawit Berdasarkan Status Kepemilikan, 2009 - 2012

Sumber : Ditjenbun, 2012 (diolah)
*) angka sementara, **) angka estimasi

b). Pelaksanaan kultur teknis yang tak memenuhi standar

Kultur teknis yang dilakukan oleh pekebun rakyat umumnya secara tradisional, yaitu terkait dengan tujuan usaha yang subsisten. Misalnya perawatan tanaman (berupa penyiangan gulma, pemangkasan, pemupukan, perlindungan tanaman) tidak sesuai dengan standar/ kaidah teknis, frekuensi maupun rotasi waktunya. Dari aspek pemupukan, petani umumnya menggunakan pupuk yang tidak sesuai dengan jenis, dosis, waktu dan cara.

c). Kesuburan tanah yang rendah

Pekebun terutama pola swadaya, pada umumnya menggunakan tanah marjinal untuk diusahakan kebun kelapa sawit. Mereka mengusahakan tanaman tidak memperhatikan topografi areal dan tingkat kemerengan (*slope*), selain itu juga tidak memahami

sifat fisik maupun kimia tanah yang terkait dengan kesuburan; sehingga tidak ada upaya untuk konservasi tanah.

d). Iklim yang kurang atau tidak kondusif

Pekebun rakyat mengusahakan tanaman kelapa sawit dengan tidak memperhatikan kondisi iklim. Salah satu syarat tumbuh kelapa sawit adalah terkait dengan curah hujan, bahwa curah hujan yang diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik adalah sekitar 2.000 mm per tahun.Namun banyak dijumpai tanaman kelapa sawit milik rakyat yang diusahakan di daerah yang tergolong kering.

UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN KRITERIA *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO)

Dalam upaya mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyusun pedoman pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang tertuang dalam SK Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 (Kementerian Peratanian, 2011). Pada peraturan menteri pertanian tersebut disebutkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014 sudah harus melasanakan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan ISPO.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 7(tujuh) prinsip bagi perusahaan dalam pelaksanaan ISPO, antara lain :

(1) sistem perizinan dan manajemen perkebunan;

(2) penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit;

(3) penundanaan izin lokasi pemberian ha katas tanah dan usaha perkebunan;

(4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

(5) tanggung jawab terhadap pekerja;

(6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan

(7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Dari tujuh kriteria yang ditetapkan dalam ISPO, hanya sebagian yang mungkin dilakukan oleh pekebun rakyat, antara lain :

(1) Sistem perizinan dan manajemen perkebunan

Yang tercakup dalam sistem perizinan dan manajemen perkebunan dalam ISPO meliputi : (a) legalitas lahan dan pengelolaan kebun sawit sebagai mitra yang tergabung dalam kelompok tani; (b) lokasi kebun plasma yang ditinjau dari aspek teknis, tata ruang, dan lingkungan, sesuai dengan perkebunan kelapa sawit; (c) lahan perkebunan bebas dari status sengketa lahan, dan apabila terdapat sengketa maka penyelesaian sengketa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku; (d) keanggotaan pekebun dalam organisasi kelembagaan petani / kelompok tani, (e) status lahan yang tumpang – tindih dengan wilayah pertambangan, dan (f) pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tim ISPO, 2013).

Manajemen diartikan sebagai serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Griffin, 2002). Manajemen usaha perkebunan kelapa sawit rakyat tentu saja berbeda dengan manajemen perkebunan besar. Perkebunan besar yang didukung oleh ketersediaan modal yang besar pula memiliki kemampuan untuk melakukan *best management practices* dalam upaya mencapai produktivitas tinggi. Perusahaan besar juga memiliki pabrik pengolahan sendiri, sehingga TBS yang dihasilkan di kebun merupakan produk antara yang kemudian diolah untuk menghasilkan *crude palm oil* (CPO). Dengan berorientasi komersial / *profit oriented*, maka penerimaan dari penjualan hasil kemudian dikelola kembali untuk keberlanjutan usaha. Alur manajemen usaha pada perkebunan besar dapat dilihat pada Gambar 3.

Berbeda dengan perkebunan besar, perkebunan rakyat kelapa sawit dengan dukungan modal yang lebih kecil, pada umumnya belum menerapkan kultur teknis yang tepat, bahkan penggunaan bahan tanaman yang tidak jelas asal-usulnya masih sering ditemui di kalangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Dengan pemeliharan kebun seadanya, maka produksi TBS yang diperoleh jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan standar potensi tanaman. Perbedaan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat lainnya yaitu produk akhir yang berupa TBS yang kemudian dijual melalui kelompok tani, koperasi,

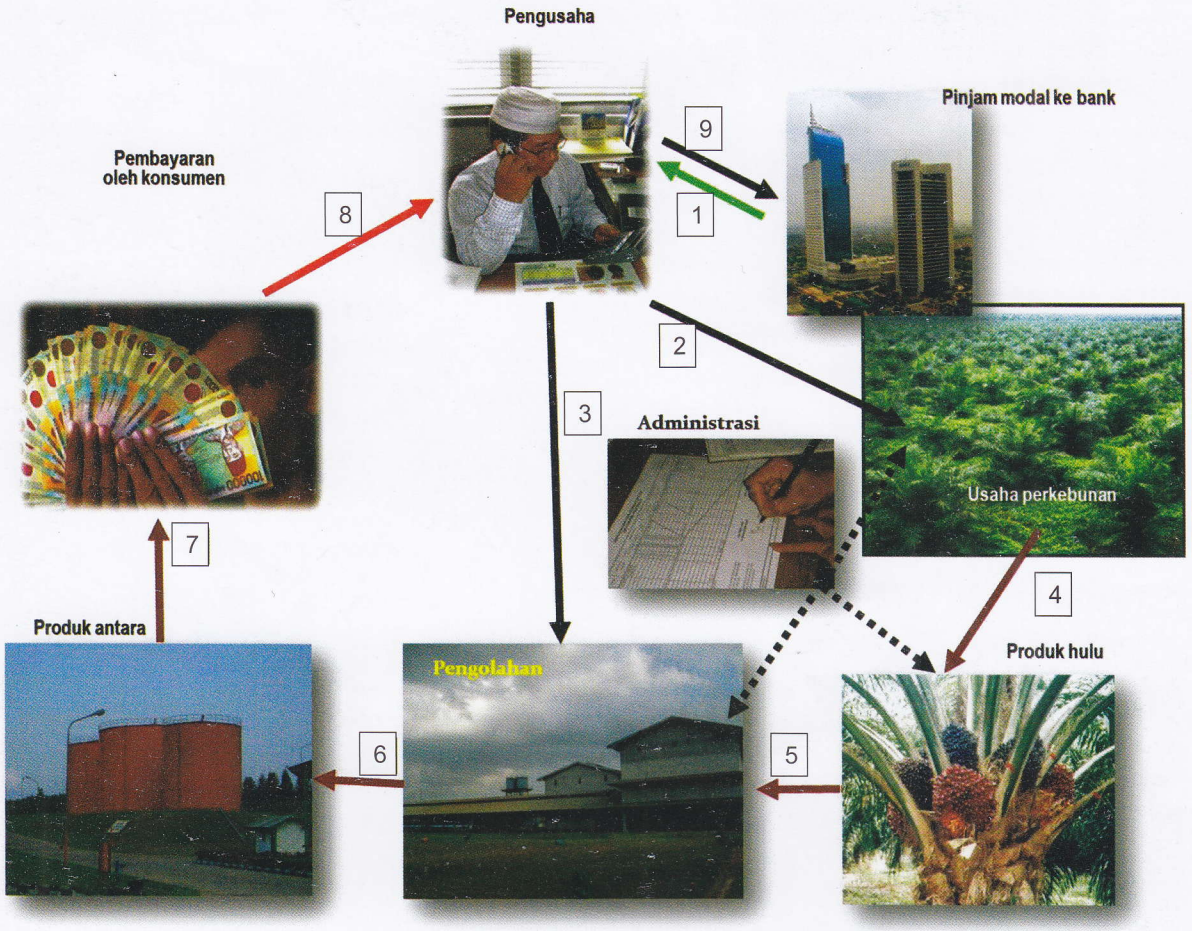

Gambar 3. Alur Manajemen Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada Perkebunan Besar

maupun pengumpul ke PKS mitra atau PKS terdekat dengan kebun petani. Dengan karakter sebagian pekebun rakyat yang masih berorientasi subsisten, maka hasil penjualan yang diperoleh utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Alur manajemen usaha perkebunan rakyat kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 4.

Dalam kegiatan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, interaksi faktor-faktor dalam proses produksi harus diperhatikan, dimulai dari pemilihan bahan tanaman unggul, kesesuaian lahan dengan tanaman kelapa sawit dengan memperhatikan aplikasi pupuk pada tanaman, dan pelaksanaan kultur teknis yang tepat, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi (curah hujan, suhu, cahaya matahari). Interaksi berbagai faktor tersebut sangat penting dalam proses metabolisme tanaman untuk mencapai produksi optimum dengan pengelolaan panen tepat. Dengan pengelolaan faktor produksi yang efektif dan efisien, akan diperoleh laba optimum sebagai hasil dari produktivitas tanaman yang tinggi. Interaksi faktor-faktor dalam proses produksi pada perkebunan kelapa sawit ditunjukkan pada Gambar 5.

Dalam manajemen usaha, tidak dapat dipungkiri adanya asumsi bahwa pelaku usaha bersikap rasional, yg berupaya memaksimalkan laba (*profit* atau *net return*). Optimalisasi laba yang diharapkan secara matematis dapat dihitung sebagai berikut :

$\prod = TR - TC$ atau $= p_0Y - v_0X$ .....(1)

Jika $p_0Y > v_0X$, maka > 0;

$p_0Y = v_0X$, maka $= 0$;

$p_0Y < v_0X$, maka < 0 ..... (2)

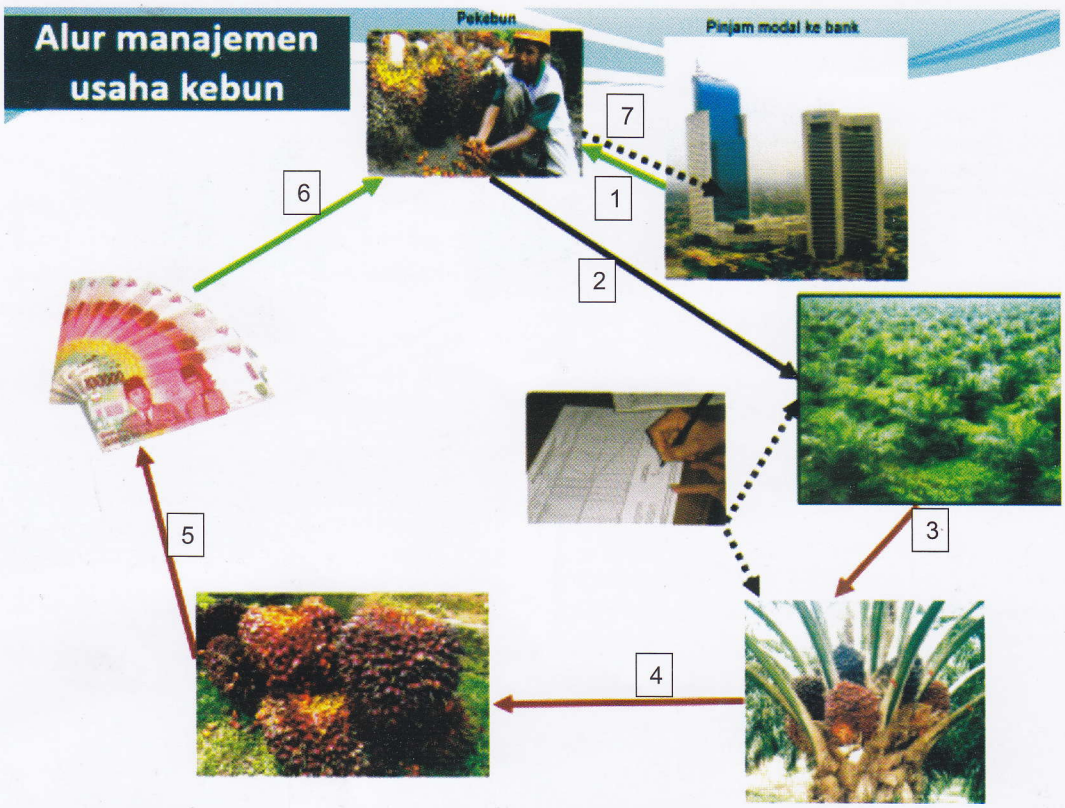

Gambar 4. Alur Manajemen Usaha Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit

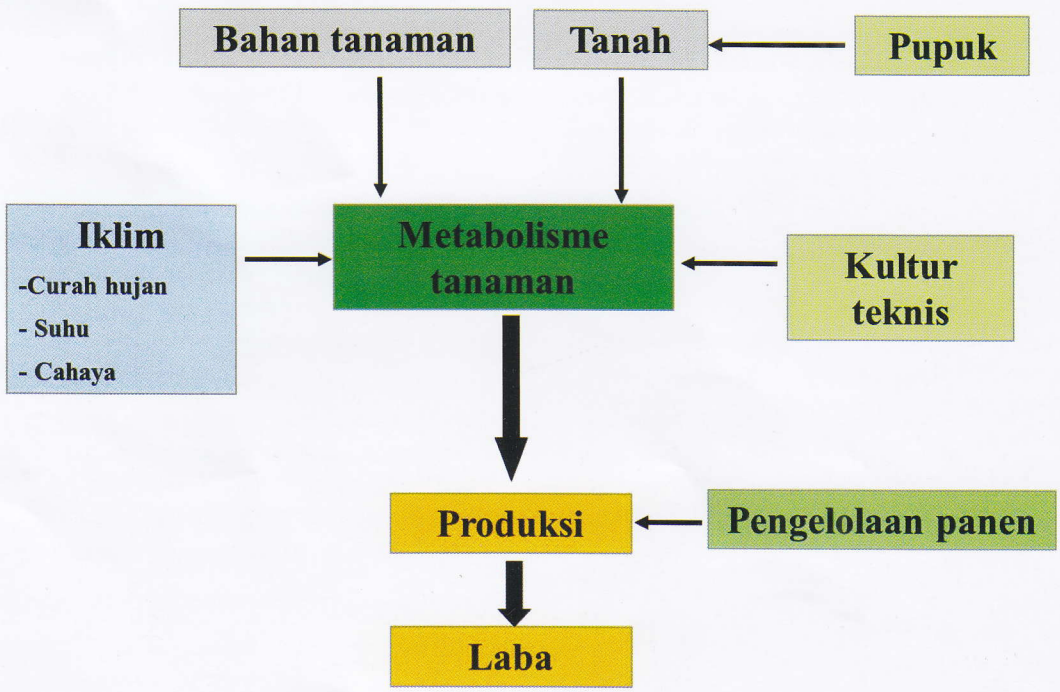

Gambar 5. Interaksi Faktor-faktor dalam Proses Produksi

Maka pelaku usaha selalu berupaya agar > 0 dengan nilai terbesar.

Terkait dengan fungsi produksi, juga berlaku teori *Neoclassical Three-Stage Production Function* yang menjelaskan tiga tahap penting dari perubahan nilai *Total Physical Production* (TPP) yang ditunjukkan pada Gambar 4 (Bintoro, 2013).

a) Tahap I (*stage I*), sampai pada saat kondisi APP (*Average Physical Production)* maksimum.

   Penambahan faktor produksi (misalnya tenaga kerja) akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini (slope kurva TPP meningkat tajam).

b) Tahap II (*stage II*),antara AP maksimum sampai saat MPP (*Marginal Physical Production*) sama dengan nol

   Karena berlakunya *Law Diminishing of Return*,baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian nilai keduanya masih positif. Penambahan faktor produksi akan tetap menambah produksi total sampai mencapai titik maksimum (slope kurva TPP datar sejajar dengan sumbu horizontal).

c) Tahap III (*stage III*), saat MPP sudah bernilai < nol (negatif)

   Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi, karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian (slope kurva TPP negatif).

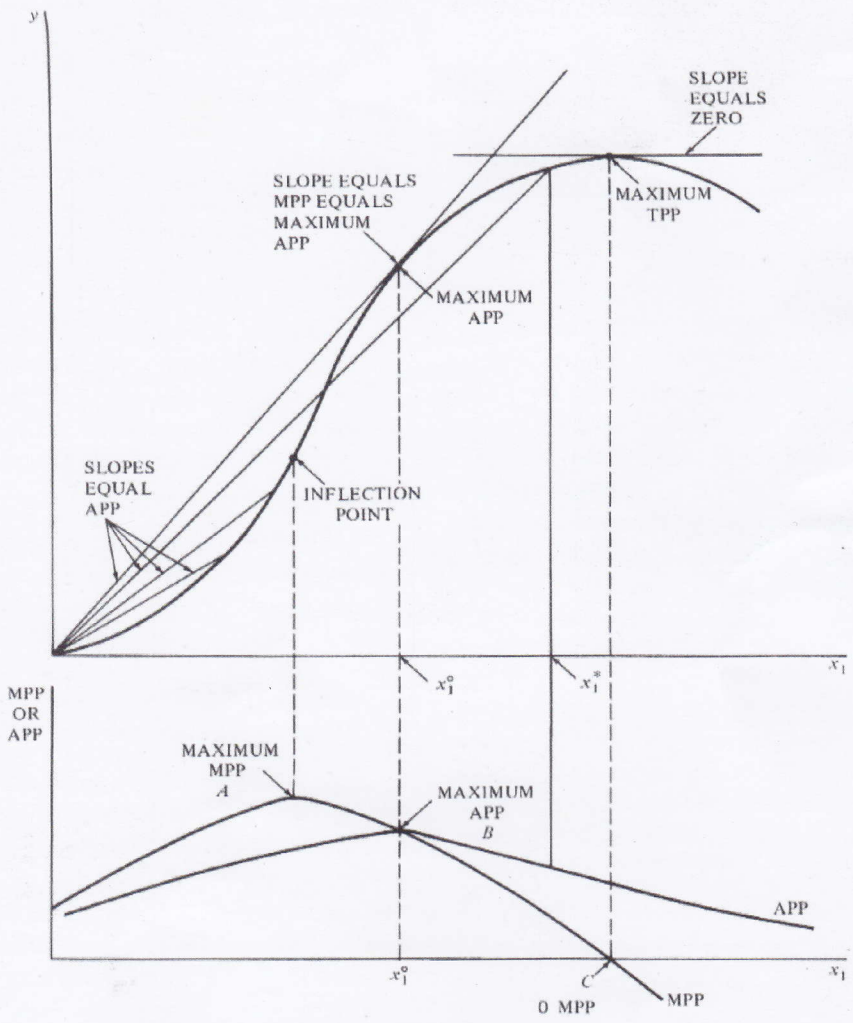

Gambar 6. Kurva Fungsi Produksi *Neoclassical Three-Stage*

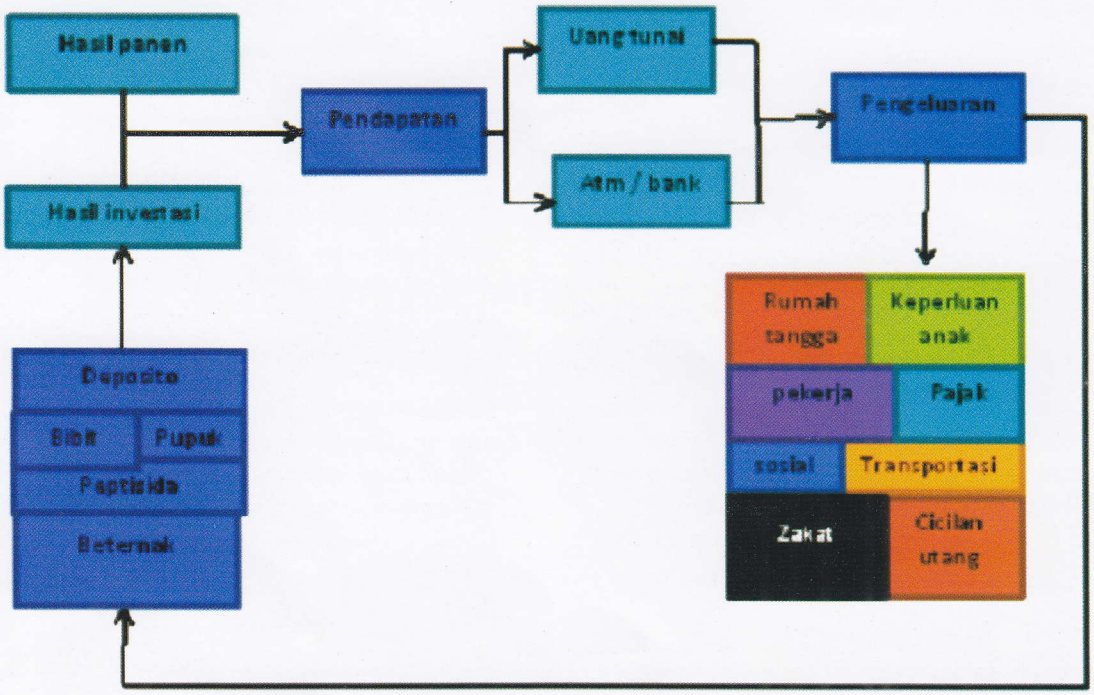

Gambar 7. Skema Manajemen Rumah Tangga Usahatani Pekebun

Manajemen perkebunan tidak hanya meliputi manajemen usahatani saja, namun juga mencakup manajemen ekonomi rumah tangga petani, dimana penjualan hasil panen TBS petani tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga dialokasikan untuk investasi usaha, baik pemeliharaan kebun, pengembangan usaha, maupun sebagai cadangan *replanting* (Gambar 7).

(2) Penerapan pedoman teknis budidaya

Salah satu permasalahan dalam manajemen perkebunan rakyat kelapa sawit yaitu penerapan kultur teknis yang kurang tepat. Bagi pekebun plasma, akses terhadap edukasi mengenai pedoman teknis budidaya relatif lebih mudah didapatkan melalui perusahaan inti, dibandingkan dengan petani rakyat kelapa sawit swadaya.

Pedoman teknis budidaya dimulai dari pemilihan bahan tanaman unggul. Kurangnya edukasi kepada pekebun mengenai pentingnya pemilihan bahan tanaman unggul yang jelas asal-usulnya menjadi masalah klasik dalam pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit. Adapun permasalahan dalam penerapan pedoman teknis budidaya yang sering ditemui di perkebunan rakyat kelapa sawit antara lain :

- Penerapan *land clearing* yang masih menggunakan sistem bakar, kurangnya pelaksanaan konservasi lahan dan air, serta desain kebun yang tidak sesuai dengan kondisi lahan.
- Pemupukan yang tidak efisien dan tidak berimbang
- Pelaksanaan *clean weeding* yang tidak tepat diterapkan di kebun maupun
- Petani lebih bergantung pada pengendalian secara khemis dibandingkan dengan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- Pelaksanaan penunasan yang tidak sesuai
- Tidak diterapkan kastrasi, sehingga terhambatnya pertumbuhan vegetatif tanaman
- Pelaksanaan panen yang tidak memperhatikan tingkat kematangan buah.

Gambar 8 (A-B). Pelaksanaan BMP pada Tanaman Belum Menghasilkan

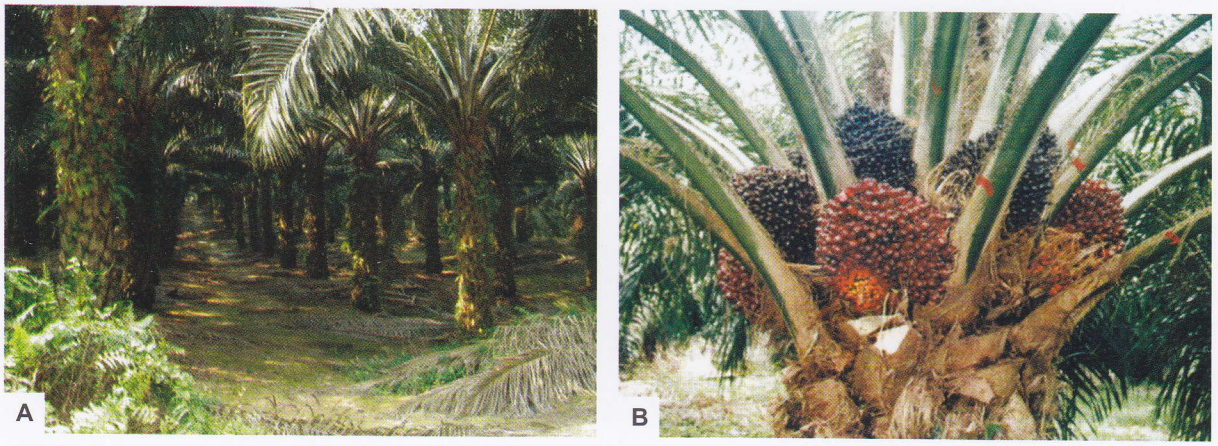

Gambar 9 (A-B). Pelaksanaan BMP pada Tanaman Menghasilkan

(3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit. Seperti diketahui bahwa kelapa sawit merupakan komoditi yang bernilai ekonomi tinggi dimana seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pengembangan industri kelapa sawit kemudian diarahkan kepada intensifikasi perkebunan secara berkelanjutan.

Aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang perlu diperhatikan meliputi kewajiban izin lingkungan yang harus dipenuhi sebelum membangun kebun, termasuk pembangunan kebun plasma oleh perusahaan inti. Selain itu, kelompok tani sebagai oraganisasi terkecil di lingkup petani rakyat juga harus melakukan tindakan preventif akan terjadinya kebakaran di areal kebun yang didukung oleh petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, maupun sistem tanggap darurat jika terjadi kebakaran di sekitar lokasi kebun. Pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar lokasi kebun maupun hutan juga tidak hanya merupakan tanggung jawab perkebunan besar, tetapi juga tanggung jawab petani rakyat. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung aspek lingkungan dapat dilihat pada Gambar 10.

(4) Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat dalam konteks pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan meliputi :

- Peningkatan penguasaan informasi pasar melalui program pelatihan dan pendampingan
- Peningkatan penguasaan aset produksi melalui redistribusi aset produksi
- Penyediaan kredit usaha

Gambar 10 (A). Reforestasi Area di Sepanjang Aliran Sungai dengan Jarak 50 m dari Tanaman Kelapa Sawit

Gambar 10 (B-C). Aplikasi Tandan Kosong Sawit (TKS) Sebagai Pupuk Organik

Gambar 10 (D-E). Pembuatan Kompos Menggunakan TKS dan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

- Peningkatan *bargaining position* petani dengan mengkoordinasi mereka dalam wadah koperasi
- Peningkatan penguasaan teknologi melalui program pelatihan dan pendampingan
- Perubahan motif usaha, etos kerja, dan pola hubungan

Dalam mewujudkan pemberdayaan petani rakyat kelapa sawit, berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain :

- Pelatihan dan pendampingan secara kontinyu oleh perusahaan mitra,
- Peningkatan komunikasi dan transparansi,
- Realisasi tindakan yangdirencanakan,
- Konsisten dalam pelaksanaan program,
- Komitmen bekerjasama,
- Dukungan kebijakan pemerintah yang tepat melalui peraturan perundang-undangan.

Program petani rakyat kelapa sawit merupakan program "C*ommunity Development*" yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transformasi sosial yang berkelanjutan;
- Mendorong/mempercepat perubahan budaya, sosial, dan ekonomi;
- Mengembangkan kesadaran dan kapasitas untuk mengelola isu sosial sebagai dorongan untuk membangun kemitraan;
- Memberdayakan dan menyertakan pranata/ lembaga sosial yang berkembang dimasyarakat;
- Masyarakat ditempatkan sebagai subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Program *Community Developmet* yang dilakukan oleh perusahaan mitra sebagai tanggung jawab sosial perusahaan tidak akan berjalan tanpa dukungan oleh kompetensi sumberdaya yang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan sumberdaya pada perusahaan mitra yang terdiri dari :

- Pengembangan motivasi serta pengetahuan teknis;
- Strategi managemen untuk mengembangkan industri hilir;
- Pelatihan identifikasi struktur dan prilaku petani mitra serta komponen masyarakat terkait lainnya;
- Pelatihan perubahan sosial masyarakat;
- Pelatihan program pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, pemerintah memandatkan pelaku industri sawit untuk melaksanakan ISPO. Pelaksanaan upaya dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan penting untuk diupayakan bagi perkebunan rakyat kelapa sawit yang merupakan bagian penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai pola pengembangan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan besar negara, pihak swasta, dan lembaga keuangan. Bagaimanapun pola pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit telah diterapkan di Indonesia, hendaknya memperhatikan kearifan lokal dalam mendukung aspek *people*, *planet*, dan *profit* pada agribisnis kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Agustira, M. Akmal dan Amalia, R. 2012. Kendala Peningkatan Produktivitas pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia. Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit Vol 17 No.1 Hal : 21-29. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan

Agustira, M., Amalia, R., dan Wahyono, T. 2012. Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) Sebagai Alternatif Pengembangan Pada Kelapa Sawit Rakyat. Jurnal PPKS Volume 20 Nomor 2 Agustus 2012 ISSN0853-196X

Anonim. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/ 3/2011. Diakses melalui http://perundangan. pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan-19-11.pdf. Diakses tanggal 12 Februari 2014.

Anonim. 2012. *Roundtable on Sustainable Palm Oil Factsheet*. Diakses melalui http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf. Diakses tanggal 12 Februari 2014.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2007. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Kementerian Pertanian, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2012. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011–2012*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).* Diakses melalui http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Permentan_no_19_tahun_2011_ISPO.pdf tanggal 12 Februari 2014. Jakarta, Indonesia

Sutarno, Bambang Bintoro. 2013. Teori Produksi. Diakses melalui http://bambangbintorosutarno.blogspot.com/2013/03/v.behaviorurldefaultvmlo.html.

Tim ISPO. 2013. Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil* / ISPO) : Persyaratan untuk Kebun Plasma (Draft). Diakses melalui http://www.ispo-org.or.id/images/Persyaratan_ISPO-Plasma-revisi_23_Januari_2013.1.pdf tanggal 12 Februari 2014. Jakarta, Indonesia

Wahyono, T dan Amalia, R. 2012. Kontribusi Kelapa Sawit Sebagai Pilar Perekonomian Bangsa (Bagian I). Sawit Indonesia Vol. II Edisi 14 (15 November – 15 Desember 2012). Jakarta.